



ISSN: 2089-2500

kiprah agroforestri

World Agroforestry Centre (ICRAF) Indonesia

Volume 7 No. 2 - Agustus 2014

Dalam Bahasa Jawa kata "pas-pasan" seringkali diartikan sebagai kekurangan atau ada unsur keterbatasan. Namun, "pas" itu sendiri berarti tepat. Agroforestri menurut Ibu Murti'ah adalah pengelolaan lahan yang pas-pasan, yang maksudnya pas dibutuhkan pas ada atau tepat waktu sesuai kebutuhan, meskipun pada lahan yang pas-pasan (pada luasan terbatas). Semua komponen, mulai dari tanaman penabung sampai tanaman penghasil kayu dapat dimanfaatkan secara maksimal, meski pada lahan yang terbatas. Pengalaman dari seorang petani kopi berusia 61 tahun menarik untuk kita simak.

Delapan langkah strategis penurunan emisi diusulkan oleh kelompok kerja multipihak di Jayapura dalam rangka mendukung perencanaan penggunaan lahan. World Agroforestry Centre (ICRAF) bersama sejumlah mitra menginisiasi dua proyek untuk tujuan tersebut. "Land-Use Planning for Low-Emissions Development Strategies (LUWES)" merupakan perangkat teknis berupa metodologi perencanaan penggunaan lahan yang mampu menjembatani keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan strategi perencanaan penggunaan lahan. Bagaimanakah upaya LUWES untuk mengakomodasi skenario tersebut?

Secured Landscape Indonesia merupakan proyek ICRAF bersama Bappeda dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, yang bertujuan untuk membantu proses penyusunan rencana aksi daerah pada tingkat kabupaten dan provinsi. Rencana tersebut dikenal sebagai RAD-GRK (Rencana Aksi Daerah Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca) yang pada Bulan Juni lalu dilaksanakan kegiatan lokakarya di Bandung. Selama lokakarya berlangsung seluruh kabupaten/kota melakukan penghitungan emisi dan rencana aksi mitigasi dengan menggunakan data-data yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Meningkatkan kemampuan petani dalam menghadapi guncangan perubahan iklim dan sosial ekonomi melalui pengembangan skema investasi bersama dalam penyediaan jasa lingkungan adalah tujuan lokakarya pengenalan Smart Tree-Invest. Proyek ini berlokasi di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah juga di negara Filipina dan Viet Nam. Pada konferensi kelima Jaringan Perhutanan Sosial ASEAN yang mengangkat tema peningkatan sumber penghidupan dan manfaat konservasi dari perhutanan sosial, selain sebagai peserta, ICRAF juga menampilkan produk-produk komunikasi dan hasil penelitiannya tentang perhutanan sosial dan agroforestri. Selanjutnya, bersama tiga mitra organisasi agroforestri di Indonesia, ICRAF membentuk agenda dalam membantu kegiatan pengembangan penelitian agroforestri pada berbagai level, mulai dari petani, keluarga, masyarakat hingga lanskap, lingkup bidang pendidikan serta masyarakat madani (*civil society*) secara umum.

ICRAF berkesempatan mengundang beberapa organisasi mitra dalam acara perpisahan Duta Besar Swiss untuk ASEAN, sebagai bentuk penghargaan keterlibatan beliau. Beliau sangat menghargai arti dan nilai hutan, bahkan melestarikan dan menjaga hutan telah menjadi budaya Negara Swiss. Namun dengan meningkatnya kebutuhan dan pertumbuhan populasi dalam negeri, banyak hutan menjadi musnah. Sejak tahun 1988, Swiss telah membantu secara teknis dan finansial lebih dari 30 proyek melalui organisasi kayu tropis internasional di Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand; dan mendukung pengembangan pendidikan sosial kehutanan di Viet Nam, mosaic lanskap hutan di Laos dan proses refleksi tentang tata kelola hutan serta desentralisasi di Indonesia.

Selamat membaca!

Tikah Atikah

daftar isi



- 3 Agroforestri pas-pasan..pas butuh,..pas ada..
- 5 Kelompok kerja multipihak Jayapura usulkan delapan langkah strategis penurunan emisi
- 7 Belajar dari proses inisiatif membangun aksi mitigasi perubahan iklim secara berjenjang: inisiasi penyusunan rencana aksi kabupaten di Provinsi Jambi
- 10 Lokakarya pembukaan penelitian Smart Tree-Invest: upaya investasi bersama dalam penyediaan jasa lingkungan di bentang alam Sulawesi
- 12 Organisasi agroforestri di Indonesia membentuk kemitraan dengan World Agroforestry Centre
- 13 Konferensi kelima Jaringan Perhutanan Sosial ASEAN "Peningkatan sumber penghidupan dan manfaat konservasi dari perhutanan sosial: menuju masyarakat ASEAN yang hijau"
- 14 Negara Swiss, ASEAN dan perhutanan sosial



Multi-strata kopi agroforestri menjadi prioritas budidaya petani pada lahan sendiri di Sumberjaya (foto: Arif Prasetyo)

kiprah agroforestri

Redaksional

Kontributor

Kurniatun Hairiah, Heni Melsandi, Wahyu Ningtyas, Masayu Y. Vinanda, Feri Johana, Bonie Dewantara, M. Thoha Zulkarnain, Sacha Amaruzaman, Betha Lusiana, Lisa Tanika, M. Siarudin, Reny Juita, Robert Finlayson

Editor

Subekti Rahayu, Sacha Amaruzaman, Reny Juita

Desain dan Tata Letak
Riky Mulya Hilmansyah

Foto Sampul
Arif Prasetyo



World
Agroforestry
Centre

World Agroforestry Centre

ICRAF Southeast Asia Regional Program
Jl. CIFOR, Situ Gede Sindang Barang, Bogor 16115
PO Box 161 Bogor 16001, Indonesia

☎ 0251 8625415; fax: 0251 8625416

✉ icraf-indonesia@cgiar.org

blog.worldagroforestry.org

http://www.worldagroforestry.org/regions/southeast_asia

Agroforestri adalah sistem pemanfaatan lahan yang memadukan pohon dengan tanaman lain dan/atau ternak

Kami mengajak pembaca untuk berbagi cerita dan pendapat mengenai agroforestri. Silahkan kirim naskah tulisan (500-1000 kata) disertai foto beresolusi besar. Saran dan kritik juga dapat ditulis di dalam blog KIPRAH di <http://kiprahagroforestri.blogspot.com/>

“Agroforestri pas-pasan..pas butuh,..pas ada..”

Laporan kunjungan lapang praktikum Mata Kuliah Agroforestri ke Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, 3 Mei 2014

Oleh: Kurniatun Hairiah, Heni Melsandi, Wahyu Ningtyas

“Punya kebun kopi ini hidup kami pas-pasan, pas butuh..ya..pas ada!”

Demikian pernyataan Bu Murti’ah, petani kopi berusia 61 tahun dari Dusun Simo, Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.



Foto: Kurniatun Hairiah

S embari menenteng arit dan tas kerja yang terbuat dari karung plastik, Bu Murti’ah tersenyum ramah, menyapa mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) yang sedang melaksanakan praktikum untuk mata kuliah agroforestri di kebunnya. Tentu saja, para mahasiswa merasa beruntung sekali bertemu dengan Bu Murti’ah, karena mereka mendapat kesempatan untuk bertanya tentang berbagai pengalaman praktis mengenai agroforestri langsung kepada seorang narasumber yang handal.

Pada petak lahan yang terbatas, hanya seluas 0,25 ha, Bu Murti’ah menanam berbagai jenis tanaman tahunan dan musiman. Tanaman utama yang ditanam adalah kopi dan kakao yang dinaungi oleh berbagai jenis pohon penayang seperti cengkeh, durian, petai, alpokat, mindi (tanaman penghasil kayu) dan berbagai varietas tanaman pisang, antara lain pisang hijau, pisang santan, pisang salaroso dan kepok. Pada awalnya tanaman kopi muda ditanam dan dinaungi oleh tanaman dadap berduri (*Erythrina sp.*), namun dari sistem tersebut tidak terlalu banyak hasil yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga Bu Murti’ah, sehingga dilakukanlah penyesuaian dengan jenis-jenis tanaman penghasil buah, kayu, dan lainnya yang dapat menghasilkan uang.

Lantai kebun pada sistem agroforestri kopi ini ditanami berbagai tanaman semusim antara lain ‘mbothe’

(*Colocasia esculenta*), cabe (*Capsicum annum*), dan sedikit tanaman obat lempuyang (*Zingiber americana*). Ada pula tanaman labu siam (*Sechium edule*), di Malang lebih dikenal dengan sebutan *gondhes*, yang merupakan tanaman penopang kebutuhan keluarga sehari-hari –pas dibutuhkan, ...pas ada!

Aliran pendapatan dalam agroforestri

Bu Murti’ah mengungkapkan hal yang menarik untuk disimak. Menurut beliau, melalui sistem agroforestri dapat diperoleh pendapatan yang terus ‘mengalir’. Dari tanaman utama kopi, setahun sekali diperoleh panen sebesar 80-100 kg biji kering. Dari hasil kopi ini Bu Murti’ah dapat mengantongi Rp700.000,- hingga Rp800.000,-. Bu Murti’ah memilih menjualnya dalam bentuk biji kering daripada kopi basah (tanpa pengolahan), karena harganya jauh lebih mahal. Harga kopi basah per kilonya hanya Rp20.000,- saja.

Dahulu Bu Murti’ah juga mengolah kopi luwak. Menurut pemaparan beliau, kopi luwak tersebut didapatkan dari kotoran luwak yang dikumpulkan di kebun, kemudian dicuci sampai bersih, setelah itu dijual kepada tengkulak. Namun, bau yang sangat menyengat dari kotoran luwak, dan nilai tambah yang tidak banyak membuat Bu Murti’ah enggan memproduksi kopi luwak lagi. Selisih harga kopi luwak dengan kopi biasa hanya Rp3.000,- per kilonya. Kopi luwak dijual dengan harga Rp23.000,- sedangkan kopi biasa seharga Rp20.000,-. Selain itu, sekarang luwak juga makin jarang ditemukan di sekitar kebun agroforestri.

Pohon penghasil uang lainnya adalah cengkeh. Cengkeh kering dijual dengan harga Rp100.000,- per kg, sedangkan cengkeh basahnya hanya seharga Rp27.000,- – Rp30.000,- per kg. Cengkeh dijual dengan sistem tebasan, yaitu tengkulak mendatangi

lahan dan memanen bunga cengkeh, sehingga meringankan tugas petani saat pemanenan. Selain cengkeh, petai, juga dijual dengan sistem tebasan. Jika buahnya banyak harga jual per tahun per pohon mencapai Rp500.000,-, namun jika buahnya jarang hanya diperoleh Rp200.000,- saja. Kadang-kadang, ada juga petani yang menjual secara eceran, dua papan petai harganya Rp2.500,-, jika 10 papan harganya hanya Rp7.500,-.

Salah satu pohon penghasil kayu dari kebun Bu Murti’ah yang juga memberikan hasil paling besar adalah mindi (*Melia azedarach L.*). Ibu Murti’ah mengatakan bila *midelan* (diameter batang) mindi mencapai 30 cm (umur sekitar 5-6 tahun), maka hasil yang diperoleh bisa mencapai Rp15-16 juta per pohon. Selain kayu mindi, ada kayu waru dengan diameter yang sama tetapi harganya sedikit lebih murah, yaitu Rp13-14 juta. “Kalau harganya bagus begini, mengapa ibu tidak tanam kayu saja semuanya” demikian pertanyaan Henny, salah seorang mahasiswa, kepada Bu Murti’ah. Dengan cepat Ibu Murti’ah menjawab sembari tersenyum. “Tidak mbak, menanam kayu kan panennya hanya sekali dengan masa tunggu yang cukup lama (5-10 tahun), saya lebih suka tanam beraneka macam tanaman yang ditanam seperti ini dengan hasil yang mengalir walau jumlahnya sedikit” —kembali pas dibutuhkan, ...pas ada!

Tanaman pisang lebih sering panen dan juga mudah dijual. Satu tandan kecil berisi 4-5 sisir (“cengkeh” dalam bahasa Jawa) seharga Rp5.000,-, tetapi bila satu tandan berisi 15-20 cengkeh bisa mencapai harga Rp20.000,- hingga Rp40.000,-. Produk non-kayu lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk bahan sayur adalah jantung pisang, yaitu pisang kepok, santan, salaroso, karena tidak semua jenis pisang jantungnya dapat dimakan.



Foto: Kurniatun Hairiah

Tanaman sayuran lainnya adalah *gondhes* (labu siam), lempuyang, dan talas. *Gondhes* dapat dijual dengan harga Rp1.000,- per kg berisi 3-4 buah ukuran besar, atau tujuh buah berukuran kecil). Panen *gondhes* dilakukan satu minggu sekali, dan kalau sedang bagus hasil panennya bisa mencapai satu kwintal. Lempuyang dan *mbothe* (talas) hanya dijadikan konsumsi sehari-hari. Bu Murti'ah memanfaatkan daun talas dan jantung pisang sebagai sayuran. Namun ketika musim panen kopi, tanaman *mbothe* ini dipangkas karena dianggap mengganggu (getah dari daun dan tangkai daunnya menyebabkan rasa gatal bila terkena kulit). "Daun talas ini sangat dibutuhkan untuk pembungkus masakan yang biasa disebut buntill, agar rasanya lebih lembut", demikian katanya.

Tidak mau membuang tempat sia-sia di lahannya, Bu Murti'ah memanfaatkan tanaman srigading (andong) sebagai pembatas kepemilikan lahan. Tanaman tersebut kadang dibeli oleh tengkulak tanaman hias dari Kota Batu, dengan harga Rp4.000,- per tanaman, sehingga Bu Murti'ah mendapatkan penghasilan tambahan dari tanaman pagar tersebut. Hal ini makin menunjukkan bahwa sistem agroforestri sarat dengan sumber pendapatan, walau jumlahnya secara terpisah sedikit-sedikit, tetapi bila dikumpulkan akan cukup signifikan bagi pendapatan petani.

Berternak sapi berdampingan dengan sistem agroforestri

Bu Murti'ah juga memiliki tiga ekor sapi yang dikandangkan di dekat tempat tinggalnya, hanya berjarak sekitar 300 m dari lahan kopinya. Sapi tersebut diambil susunya, sedangkan



kotorannya digunakan untuk bahan dasar biogas. Suami Bu Murti'ah, Pak Sumantri, berkerjasama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Ngantang untuk menjual susu sapi, sebaliknya KUD Ngantang memberikan dedak yang digunakan oleh Pak Sumantri untuk *menyombor* (memberi minum dan pakan) sapi. Kotoran sapi yang ada digunakan oleh Pak Sumantri untuk membuat biogas. Beliau membeli alat untuk pembuatan biogas seharga Rp6 juta, hasilnya digunakan untuk memasak setiap hari, dan kadang juga digunakan untuk menyalakan lampu rumah.

Dari biogas tersebut, berapa rupiah yang bisa dihemat untuk membeli gas alam atau kayu bakar atau minyak tanah dan listrik?

Perawatan lahan agroforestri kopi

Menurut cerita Bu Murti'ah, lahan yang dimilikinya merupakan warisan dari orang tuanya sejak tahun 1968. Sebelum dikelola dalam bentuk agroforestri, lahan tersebut ditanami rumput kolonjono untuk pakan ternak. Namun, Bu Murti'ah mulai berpikir untuk menanam kopi yang disertai dengan pohon dadap sebagai penanung. Pohon dadap yang pertumbuhannya cepat bisa dimanfaatkan sebagai pakan dan penyubur tanah. Secara bertahap, lahan tersebut ditanami dengan berbagai macam pohon sampai sekarang.

Perawatan pada lahan agroforestri yang dilakukan oleh Bu Murti'ah hanya pemangkasan ranting kopi yang kering dan pelepah pisang yang menguning setiap tiga bulan sekali.

Perawatan tanah yang dilakukan adalah pemupukan, berupa pupuk urea dan pupuk organik. Pemupukan tidak dilakukan secara tetap, tapi biasanya satu tahun sekali.

Pupuk urea dan ZA yang digunakan masing-masing berjumlah satu sak sebanyak $\frac{1}{2}$ kwintal untuk lahan seluas 0,25 ha. Harga pupuk urea Rp96.000,- per sak dan pupuk ZA seharga Rp72.000,- per sak. Pupuk organik yang digunakan adalah tetes tebu Rp1.200,- per liter dan $\frac{1}{2}$ kwintal pupuk kotoran ayam horn/kompos. Selebihnya, menurut pemaparan beliau, tambahan pupuk organik hanya bergantung pada masukan seresah, cabang dan ranting pohon yang melapuk di lahan.

Perawatan lahannya kadang tidak dilakukan sendiri oleh Bu Murti'ah, tetapi mengupahkan kepada orang lain berupa tenaga kerja harian, dengan upah Rp15.000,- untuk tenaga kerja wanita dan Rp20.000,- untuk tenaga kerja pria. Selain upah, Bu Murti'ah juga menyediakan makan siang pekerjaannya seharga Rp15.000,-.

Keanekaragaman hayati di agroforestri kopi

Saat bercengkrama dengan Bu Murti'ah di kebun kopinya, terlihat 3 burung bertengger pada dahan pohon yang tinggi sembari bersiul riang, tidak terganggu oleh orang di bawahnya. Menurut Bu Murti'ah, selain burung banyak hewan lain yang sering ditemui di lahannya antara lain: bajing yang sering datang memakan buah kelapa, tungau atau (Jw: *tengu*), dan cacing tanah. Bu Murti'ah memaparkan bahwa jumlah cacing di lahan tersebut tidak sebanyak dahulu, karena cacing di lahan beliau banyak digunakan sebagai pakan bebek sehingga jumlahnya semakin sedikit. Justru di sekitar tempat tinggal beliau, cacing tanah lebih banyak didapati karena banyak kotoran sapi. Selanjutnya Bu Murti'ah menambahkan bahwa dahulu banyak terdapat luwak yang memakan biji kopi di lahan tersebut, namun sekarang sudah tidak pernah ditemukan lagi. Meskipun begitu, luwak masih dapat ditemukan di kebun lain milik beliau yang berada di dekat hutan, begitu juga dengan celeng, monyet, dan *Lutung budeng*.

Kelompok kerja multipihak Jayapura usulkan delapan langkah strategis penurunan emisi

Oleh: Masayu Y. Vinanda

Dengan luas hutan alam yang mencapai lebih dari 25,8 juta hektar atau hampir sepertiga dari luas hutan alam di Indonesia, Provinsi Papua tak luput menjadi salah satu wilayah prioritas bagi upaya mitigasi perubahan iklim. Di sisi lain, investasi berskala besar yang memprioritaskan pada pengembangan aktivitas ekonomi dari sektor lahan tercatat sebagai salah satu ancaman terhadap kelestarian hutan Papua dan berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca.

Perencanaan penggunaan lahan yang baik menjadi solusi penting dalam mendorong upaya mitigasi perubahan iklim. World Agroforestry Centre (ICRAF) bersama sejumlah mitra sejak 2013 lalu telah menginisiasi dua proyek yang bertujuan untuk mendorong pembangunan rendah emisi melalui berbagai upaya perbaikan dalam proses perencanaan penggunaan lahan. Proyek tersebut adalah Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat Sipil pada Proses Perencanaan Tata Guna Lahan untuk Pembangunan Rendah Emisi atau Participatory monitoring by civil society of land-use planning for low-emissions development strategies (ParCiMon) yang didanai oleh Uni Eropa dan proyek Aksi Mitigasi Lokal dari Sektor Berbasis Lahan atau Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia (LAMA-I) yang memperoleh dukungan pendanaan dari Danish International Development Agency (DANIDA).

ParCiMon menitikberatkan pada pembangunan kapasitas masyarakat sipil dalam proses pemantauan dan evaluasi perencanaan penggunaan lahan di tiga kabupaten di Provinsi Papua yakni Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Sementara itu, kegiatan LAMA-I difokuskan pada pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun strategi perencanaan penggunaan lahan sebagai upaya mensukseskan misi penurunan emisi. Selain melakukan pengembangan kapasitas pemerintah daerah di tiga kabupaten lokasi kerja ParCiMon di



Foto: Masayu Y. Vinanda

Provinsi Papua, LAMA-I juga bekerja di tiga kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yakni Musi Rawas, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Dua proyek ini saling bersinergi demi mencapai satu misi bersama yakni mendorong pembangunan yang rendah emisi sebagai salah satu kontribusi penting dalam mensukseskan agenda mitigasi perubahan iklim nasional.

Mengedepankan partisipasi dan inisiatif lokal

Partisipasi aktif berbagai pihak menjadi elemen penting dalam pelaksanaan proyek ParCiMon dan LAMA-I. ICRAF telah mengembangkan suatu perangkat teknis berupa metodologi perencanaan penggunaan lahan yang mampu menjembatani keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan strategi perencanaan penggunaan lahan. Perangkat yang diberi nama "Land-Use Planning for Low-Emissions Development Strategies (LUWES)" ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang menyediakan langkah sistematis dan alat bantu pengembangan kapasitas dalam penyusunan konsep dan aplikasi penurunan emisi dari sektor lahan serta mendukung negosiasi multi-pihak dalam membangun strategi pembangunan rendah emisi berbasis lahan. LUWES berupaya

untuk mengakomodasi skenario dan melakukan analisa *trade-off* sebagai dasar negosiasi serta membantu merumuskan rencana aksi dari proses negosiasi multipihak. Dalam perjalanannya, LUWES kemudian dikembangkan menjadi *Land-Use Planning for Development with Multiple Environmental Services* (LUMENS) dengan menambahkan elemen baru yang mencakup adaptasi perubahan iklim, dampak terhadap iklim lokal, perlindungan terhadap daerah aliran sungai (DAS) dan zona penyangga, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, serta aspek ekonomi hijau. Melalui aplikasi LUMENS, maka perencanaan penggunaan lahan yang baik tidak hanya mengedepankan upaya penurunan emisi dan peningkatan cadangan karbon, tetapi juga memperhatikan aspek jasa lingkungan lainnya seperti keanekaragaman hayati dan fungsi DAS. Dengan kata lain, segenap aktivitas penggunaan lahan selayaknya tak hanya bertumpu pada pembangunan ekonomi semata, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian dan perbaikan kualitas lingkungan. Selain pengembangan perangkat teknis, kesiapan instrumen kelembagaan pun menjadi prioritas untuk menjamin proses penyusunan rencana penggunaan lahan yang



Foto: Masayu Y. Vinanda

partisipatif dan inklusif. Bertumpu pada dasar pemikiran ini, maka dibentuklah Kelompok Kerja Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi (Pokja IPRE) yang berperan sebagai forum yang mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif berbagai pihak dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan rendah emisi berbasis lahan. Pokja multipihak ini beranggotakan perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berbasis lahan, masyarakat adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal, akademisi, dan sektor swasta. Pokja inilah yang menjadi mesin penggerak utama di tingkat kabupaten yang mendorong disusunnya strategi perencanaan penggunaan lahan berikut sistem pemantauan dan evaluasinya. Secara garis besar kelompok ini terbagi dalam dua kelompok besar berdasarkan fungsinya, yaitu: (1) kelompok perencanaan yang berperan dalam menyusun strategi perencanaan penggunaan lahan dalam upaya pembangunan rendah emisi; (2) kelompok yang memantau dan mengevaluasi siklus perencanaan pembangunan rendah emisi di sektor berbasis lahan. Serangkaian kegiatan kapasitas teknis dan pendampingan terhadap Pokja dilakukan oleh ICRAF beserta mitra lokalnya melalui proyek ParCiMon dan LAMA-I.

Sebuah capaian penting Pokja IPRE Jayapura menuju pembangunan rendah emisi

Sejak Januari 2013 lalu, program pengembangan kapasitas telah digiatkan di tiga lokasi ParCiMon di Provinsi Papua. Upaya ini berbuah manis. Pada 19 Mei 2014, Pokja IPRE Jayapura untuk pertama kalinya menyampaikan rancangan awal dokumen strategi penurunan emisi melalui suatu kegiatan konsultasi publik. Kegiatan konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan beragam pemangku kepentingan kunci di Jayapura dan secara resmi dibuka oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, MSI. Rancangan strategi tersebut diformulasikan dalam “Delapan Langkah Strategis Penurunan Emisi dari Sektor Lahan” yang diperoleh melalui proses identifikasi dan inventarisasi sumber-sumber emisi, alokasi kebutuhan lahan, penentuan tingkat emisi acuan atau *Reference Emission Level (REL)*, serta diskusi dengan masyarakat.

Secara umum, delapan langkah tersebut menitikberatkan pada dua skenario utama yakni upaya pencegahan penurunan cadangan karbon dan peningkatan cadangan karbon. Melalui aksi mitigasi tersebut, penurunan emisi Jayapura ditargetkan mencapai 14% dari proyeksi total emisi pada tahun 2020.

Ketua Pokja IPRE Jayapura, Yos Levi Yoku, mengemukakan bahwa guna mencegah penurunan cadangan karbon, pemerintah daerah akan memprioritaskan upaya mempertahankan tutupan lahan hutan primer dan sekunder di kawasan hutan lindung di sekitar distrik Unurum Guay, Yapsi, dan Kaureh serta Cagar Alam Cyclop. Cagar Alam Cyclop yang terletak di Distrik Rafeni Rara, Depapre, Sentani Barat, Waibu, Sentani, Sentani Timur dengan luas sekitar 20.075 hektar berperan penting dalam penyediaan fungsi jasa lingkungan seperti air, udara, dan keanekaragaman hayati.

Sementara itu upaya meningkatkan cadangan karbon yang diusulkan mencakup tiga aktivitas utama yakni restorasi atau penanaman pohon, rehabilitasi lahan kritis, serta pengembangan kebun campur di kawasan perkebunan masyarakat. Kegiatan restorasi dilakukan dengan pengembangan hutan sagu di Unit Perencanaan Sempadan Danau yang terletak di Distrik Sentani Timur serta penanaman di sejumlah kawasan rawan longsor. Upaya rehabilitasi lahan kritis dipusatkan di kawasan cagar alam Cyclop dan hutan produksi di Kecamatan Unurum Guay dimana banyak ditemukan lahan kritis akibat aktivitas pengambilan kayu. Sementara itu kegiatan agroforestri dengan mengembangkan berbagai komoditi bernilai ekonomi tinggi diharapkan tidak hanya mampu berkontribusi dalam meningkatkan cadangan karbon, tetapi sekaligus juga berperan dalam membangun perekonomian lokal.

Beragam masukan yang diperoleh dari hasil konsultasi publik akan menjadi pedoman dalam proses penyempurnaan dokumen strategis penurunan emisi dari sektor lahan di Kabupaten Jayapura yang telah disusun Pokja. Kegiatan tersebut juga berperan penting dalam upaya membangun dukungan dan komitmen yang lebih solid serta memperkuat sinergi berbagai pihak yang menjadi kunci dalam keberhasilan proses implementasi rencana aksi mitigasi tersebut di masa depan.

Belajar dari proses inisiatif membangun aksi mitigasi perubahan iklim secara berjenjang: inisiasi penyusunan rencana aksi kabupaten di Provinsi Jambi

Oleh: Feri Johana, Bonie Dewantara, M. Thoha Zulkarnain

" Sebagai orang baru, kami tadinya belum tahu harus merevisi darimana dokumen ini (Rencana Aksi Daerah - RAD), tetapi sekarang lebih punya gambaran untuk memulai dan menyelesaikannya", itulah kalimat yang muncul dari Ibu Lia, salah seorang pelaku penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) di Provinsi Jambi dalam sesi diskusi pada bagian akhir kegiatan Lokakarya dan Pelatihan Perhitungan *Reference Emission Level* (REL) untuk Menyusun Rencana Aksi Daerah Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca dan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) dari Sektor Berbasis Lahan yang Terintegrasi pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten yang dilakukan selama enam hari (2-7 Juni 2014) di Hotel Jayakarta Bandung.

Lokakarya dan pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya Provinsi Jambi dalam menyempurnakan RAD-GRK serta melakukan kegiatan Pelaporan, Evaluasi dan Pelaporan terhadap RAD-GRK. Salah satu kendala yang dirasakan dalam penyusunan RAD dan GRK tersebut adalah kurangnya keterlibatan kabupaten dalam setiap proses yang harus dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut diperlukan sebuah kerangka kerja yang dapat mensinkronkan dan mengharmoniskan semua kegiatan aksi mitigasi perubahan iklim antar kabupaten dan antara kabupaten dengan provinsi.

Kemajuan kegiatan penyusunan aksi mitigasi

Mitigasi perubahan iklim merupakan suatu upaya untuk mencegah atau mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dalam rangka menanggulangi dampak perubahan iklim, dan meluasnya dampak perubahan iklim

yang kita rasakan seperti meningkatnya temperatur udara, berubahnya pola hujan, kekeringan yang menyebabkan terjadinya bencana yang merugikan bagi manusia.

Kegiatan pencegahan dan pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia telah dilakukan melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD) pada tingkat provinsi. Kemajuan penyusunan RAD ditandai dengan terbentuknya regulasi untuk pelaksanaan RAD provinsi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) pada seluruh provinsi di Indonesia.

Proses penyusunan aksi mitigasi saat ini terus berjalan dan sudah beberapa kali melewati berbagai tahapan untuk meningkatkan kualitas dan kesempurnaan rencana-rencana aksi yang sudah dibuat. Kesempurnaan meliputi peningkatan kualitas data yang digunakan, metode, maupun kesesuaiannya dengan rencana pembangunan masing-masing daerah. Sebagaimana beberapa provinsi lainnya, Jambi telah menginisiasi penyusunan rencana aksi mitigasi

yang lebih operasional pada tingkat kabupaten dengan dikeluarkannya Pergub Jambi No 36 tahun 2012. Pergub tersebut merekomendasikan penyusunan Rencana Aksi Daerah yang harus dibuat oleh kabupaten/kota dilingkup Provinsi Jambi.

Inisiatif ini perlu diapresiasi mengingat bahwa aksi mitigasi merupakan sebuah upaya yang memerlukan konsistensi dan komitmen yang tinggi. Kinerja upaya penurunan emisi harus dapat diukur, artinya bahwa operasionalisasi rencana aksi merupakan sebuah keharusan yang harus dilaporkan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Dalam Negeri, melalui Gubernur sesuai dengan yang disyaratkan Peraturan Presiden No 61 tahun 2011. Hal ini mengandung pengertian bahwa kabupaten/kota memiliki peran penting dalam implementasi aksi mitigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah kabupaten.





Catatan selama kegiatan

Secured Landscape Indonesia merupakan suatu proyek yang saat ini dilakukan secara bersama antara World Agroforestry Centre (ICRAF), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, serta seluruh Bappeda dan Dinas Kehutanan Kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Jambi. Salah satu tujuan proyek ini adalah membantunya proses penyusunan rencana aksi daerah pada tingkat kabupaten dan provinsi, serta untuk memunculkan sinergitas di antara keduanya. Kerjasama ini telah tertuang dalam SK Kepala Bappeda No. 23/SKK/Bappeda-2.2/V/2014

Sebagai bagian untuk menumbuhkan kesadaran dan peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan rencana aksi mitigasi perubahan iklim hingga implementasinya, kegiatan ini merupakan kegiatan awal yang memberikan dampak terhadap kegiatan lain dimasa yang akan datang dalam pembangunan yang rendah emisi untuk menjawab masalah perubahan iklim. ICRAF bersama Bappeda, Badan Lingkungan Hidup (BLHD), dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dari seluruh kabupaten/kota Provinsi Jambi secara intensif melakukan konsultasi dalam upaya penyusunan dan revisi teknis RAD-GRK Provinsi dan inisiasi penyusunan RAD-GRK Kabupaten/kota. Dorongan penyusunan RAD-GRK Kabupaten/kota sangat intensif dilakukan oleh Bappeda dan BLHD Provinsi Jambi, sebagai mana amanat Peraturan Gubernur No. 36/2012.

Dalam kaitan dengan kerjasama tersebut kegiatan bersama ini berupa lokakarya dan lokaltatih perhitungan *Reference Emission Level* (REL), yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman bersama mengenai isu-isu perubahan iklim, beberapa definisi terkait isu perubahan iklim, pengenalan

mengenai metodologi penyusunan tingkat emisi acuan atau REL, dan metode dalam penyusunan rencana aksi mitigasi.

Kegiatan lokakarya dan pelatihan ini dihadiri juga oleh Pejabat Bappeda Provinsi Jambi dan narasumber dari Bappenas. Acara dimulai dengan pengantar dari Dr. Sonya Dewi selaku Country Coordinator, ICRAF Indonesia, dilanjutkan dengan pembukaan acara oleh Bapak Ammar Solahuddin dari Bappeda Provinsi Jambi, serta paparan Bapak Pungky Widiaryanto dari Bappenas yang memberikan arahan pelaksanaan RAD-GRK, Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan, perkembangan saat ini sampai dengan sumber pendanaan kegiatan, dan rencana tindak lanjut nasional dalam implementasi RAN-GRK. Sementara, pada bagian akhir kegiatan lokakarya dan pelatihan tersebut, Dr. Atiek Widayati selaku Koordinator Proyek Secured Landscape Indonesia menyatakan kesiapan dan upaya ICRAF yang terus menerus akan dilakukan untuk mendukung kegiatan dalam konteks mitigasi perubahan iklim secara berjenjang di Provinsi Jambi.

Selama kegiatan lokakarya dan pelatihan berlangsung, seluruh kabupaten/kota melakukan penghitungan emisi, pembuatan REL, dan rencana aksi mitigasi dengan menggunakan data-data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan menggunakan data asli yang dikumpulkan dan dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota, diharapkan hasil perhitungan dan analisis nantinya akan memiliki aspek legitimasi untuk menyusun RAD-GRK Kabupaten/kota selanjutnya. Hasil perhitungan dan penulisan deskripsi teknis yang digunakan sebagai materi dokumen RAD-GRK Kabupaten/kota memang diperlukan untuk memperoleh dukungan pemangku kepentingan lainnya melalui konsultasi publik.

Peningkatan dampak kegiatan: pelibatan pelatih dari kabupaten/kota

Kegiatan lokaltatih yang dilakukan ini melibatkan partisipasi aktif dari beberapa pelatih yang berkompeten dan sudah pernah melakukan proses penyusunan pembangunan rendah emisi. Pelatih tersebut berasal dari beberapa komponen pemerintah daerah yang berasal dari Kabupaten Merangin, Tanjung Jabung Barat dan Batang Hari.

Proses interaksi dan diskusi selama kegiatan ini berlangsung dengan baik dan tepat sasaran. Keadaan ini terjadi karena Provinsi Jambi dan seluruh kabupaten/kota memiliki kesamaan persepsi dalam menanggapi masalah dan mengimplementasikan kegiatan penurunan emisi yang lebih nyata. Berbagai pengalaman teknis dan telaah kebijakan dari masing-masing kabupaten/kota menjadi bahan diskusi dan pembahasan yang menarik.

Hasil perhitungan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam lokakarya ini sudah menentukan langkah awal dan mencoba mengambil keputusan untuk menggunakan dua metode dalam penyusunan REL yaitu metode proyeksi historis (berdasarkan laju emisi masa lampau yang ditentukan oleh laju perubahan perubahan tutupan dan penggunaan lahan) dan metode *forward looking* (berdasarkan perencanaan dan pengembangan penggunaan lahan di masa yang akan datang). Beberapa kabupaten/kota memilih metode proyeksi historis sementara beberapa kabupaten lain menggunakan metode *forward looking* dengan beberapa alasan yang mendasari.

Melalui lokaltatih ini kabupaten/kota dan provinsi ini telah menghasilkan perhitungan REL-nya masing-masing, walaupun masih awal setidaknya memberikan gambaran mengenai kemajuan proses dalam penyusunan RAD. Ketersediaan REL kabupaten/kota dan provinsi akan mempermudah dalam memformulasikan REL yang nantinya akan disepakati dan sebagai pegangan provinsi dalam membuat aktivitas mitigasi yang akan dilaporkan secara nasional dan akan diikuti dengan implementasi mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP). Tahapan selanjutnya adalah proses negosiasi dengan para pemangku kepentingan untuk membuat kesepakatan apakah perhitungan REL provinsi merupakan kumulatif dari REL kabupaten/kota,

ataukah perhitungan REL provinsi menjadi materi elaborasi, sehingga kabupaten/kota dapat mengacu dan dapat mengambil bagian sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing, dimana hal tersebut dapat diselesaikan melalui rapat-rapat dan diskusi dalam Kelompok Kerja provinsi dan kabupaten/kota yang telah dibentuk.

Telaah, diskusi, dan alternatif penyelesaian masalah sebagai hasil lokakarya dan pelatihan ini menjadi catatan penting dan menjadi catatan bersama untuk menyempurnakan sistematisasi kelembagaan penurunan emisi GRK di tingkat kabupaten/kota yang menjadi komponen RAD-GRK Provinsi.

Beberapa rekomendasi lanjutan

Beberapa catatan penting dalam proses penyusunan RAD-GRK kabupaten/kota di Provinsi Jambi adalah diperlukan dukungan provinsi dan kabupaten/kota, dalam bentuk pengembangan kelembagaan dan dukungan regulasi. Dukungan dari sisi teknis diperlukannya kegiatan lanjutan dengan melibatkan parapihak pemangku kepentingan yang lebih luas pada masing-masing kabupaten/kota.

Proses penyusunan RAD-GRK kabupaten/kota ini diharapkan

menjadi kegiatan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan kegiatan RAD-GRK pada tingkat provinsi. Pertimbangan penting untuk upaya tersebut berkaitan dengan regulasi yang sudah berjalan saat ini, kewenangan kabupaten/kota dalam perencanaan, pengembangan dan pembangunan wilayah, ketersediaan data, dan penguasaan konteks wilayah oleh kabupaten/kota. Sementara Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan menyebutkan bahwa provinsi memiliki kewenangan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sehingga hubungan kelembagaan RAD-GRK kabupaten/kota dan provinsi seharusnya lebih koordinatif, sinergis, dan terintegrasi.

Komitmen dan semangat untuk melakukan mitigasi perubahan iklim seharusnya dapat melekat pada semua pihak yang terkait. Pengertian dari komitmen dan semangat ini adalah bahwa masalah perubahan iklim seyogyanya dapat mewarnai kegiatan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan yang terintegrasi pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Dalam penyusunan aksi mitigasi perlu juga diidentifikasi secara jelas mengenai kondisi pemungkin terhadap implementasi rencana

aksi yang telah dibuat. Identifikasi kondisi pemungkin merupakan bagian dari upaya lebih lanjut untuk menjamin bahwa aksi mitigasi akan memungkinkan dilanjutkan menuju tahapan implementasi. Kesalahan dalam mengidentifikasi kondisi pemungkin akan mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Kegiatan identifikasi kondisi pemungkin merupakan aktivitas yang juga merupakan tahapan lanjutan dari proses penyusunan RAD-GRK kabupaten/kota.

Beberapa catatan rekomendasi lanjutan di atas merupakan bagian dari rencana tindak lanjut kegiatan sebagai hasil diskusi seluruh kabupaten/kota dan provinsi yang terlibat dalam kegiatan lokakarya dan lokalatih tersebut. Catatan tindak lanjut merupakan upaya untuk mempertahankan proses agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan untuk menyusun rencana aksi daerah di seluruh kabupaten/kota, serta menyempurnakan RAD-GRK Provinsi dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah, prinsip berjenjang, dan berorientasi pada tingkat keberhasilan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca yang dapat dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota.

Sambungan dari halaman 4

Dampak erupsi Gunung Kelud

“Waktu ada guntur Gunung Kelud apakah kebun ibu juga terkena dampaknya?” demikian Tyas, mahasiswa peserta praktikum, bertanya. Bu Murti’ah menjawab “Oh ya, semua tanaman yang ada di sini daunnya tertutup pasir dan debu, tetapi tidak menyebabkan kematian tanaman, cuman duren saya jadi tidak berbunga. Sementara, kebun-kebun yang berada di dekat hutan yang terkena aliran lahar dari letusan Gunung Kelud, mengalami penurunan produksi dan panen kopi yang biasanya mencapai 4,0 sampai 4,5 kwintal menjadi gagal panen.

Menurut keterangan salah seorang petani dari Desa Kutut, salah satu desa yang paling berat merasakan dampak erupsi Gunung Kelud, Pak Lasirin, mengatakan bahwa pohon sengon dan waru adalah dua jenis pohon yang tidak

mati terkena abu Kelud. Sementara, beberapa pohon yang masih bertunas kembali setelah terkena Gunung Kelud adalah durian, kelapa, alpukat, mahoni, pisang, dan petai. Namun, tanaman semusim tidak satupun yang bisa bertahan, bahkan jahe yang ditanam Bapak Lasirin semuanya busuk tertimbun abu tebal Gunung Kelud. Di beberapa tempat timbunan abu Gunung Kelud nampak tanahnya padat sekali sehingga dalam jangka pendek, kemungkinan tanaman akan mengalami kekeringan.

Cerita di atas mengandung suatu pembelajaran yang sangat penting. Di satu pihak, sistem agroforestri yang terdiri dari beraneka jenis tanaman setahun dan tanaman tahunan memberikan manfaat yang mengalir secara terus-menerus dan pas-pasan, artinya pas dibutuhkan pas ada. Di

lain pihak, daerah Ngantang dimana agroforestri banyak diterapkan oleh petani merupakan daerah yang dekat dengan gunung berapi yang aktif dan mengalami dampak besar ketika terjadi bencana, terutama kematian tanaman semusim mereka. Artinya, petani di Ngantang ini sangat rentan terkena dampak bencana. Oleh karena itu, penelitian dari berbagai aspek (fisik, ekologi, sosial dan ekonomi) yang lebih terpadu sangat dibutuhkan bagi masyarakat di Ngantang, sehingga hasil-penelitian tersebut ke depannya dapat membantu petani untuk beradaptasi dan melakukan aksi mitigasi dalam menghadapi bencana.

Penulis dari Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur

Lokakarya pembukaan penelitian Smart Tree-Invest: upaya investasi bersama dalam penyediaan jasa lingkungan di bentang alam Sulawesi

Oleh: Sacha Amaruzaman, Betha Lusiana, Lisa Tanika



Foto: Tim Smart Tree-Invest

Sekilas tentang konferensi

Kegiatan pertanian di Asia pada umumnya rentan terhadap guncangan (*shocks*) dan tekanan (*pressure*), baik yang disebabkan oleh perubahan iklim maupun perubahan kondisi sosial-ekonomi dan politik. Akibatnya, kehidupan petani pun menjadi rentan, apalagi jika petani kurang mampu melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan yang terjadi. Kerentanan petani terhadap guncangan semakin bertambah apabila petani memiliki keterbatasan akses terhadap lima modal dasar yaitu modal keuangan, fisik, sosial, manusia, dan alam. Padahal akses terhadap lima modal dasar ini sangatlah penting dimiliki petani untuk menjalankan penghidupan yang berkelanjutan. Proyek penelitian "Climate-Smart, Tree-Based, Co-investment in Adaptation and Mitigation in Asia" (Smart Tree-Invest) yang dikoordinasi oleh The World Agroforestry Center (ICRAF) berupaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menghadapi guncangan perubahan iklim dan sosial ekonomi melalui pengembangan skema investasi bersama dalam penyediaan jasa lingkungan.

Lokasi penelitian Smart Tree-Invest di Indonesia

Proyek Smart Tree-Invest dilaksanakan di tiga negara yaitu: Indonesia, Filipina dan Viet Nam. Di Indonesia, proyek ini berlokasi di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Buol dengan luas 4.043,57 km² berbatasan dengan Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah di sebelah barat dan Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo di sebelah timur.

Saat ini, kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) sedang menghadapi ancaman alih guna lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, sedangkan daerah pesisir yang berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi telah mengalami deforestasi hutan bakau yang menyebabkan abrasi.

Lokakarya Smart Tree-Invest

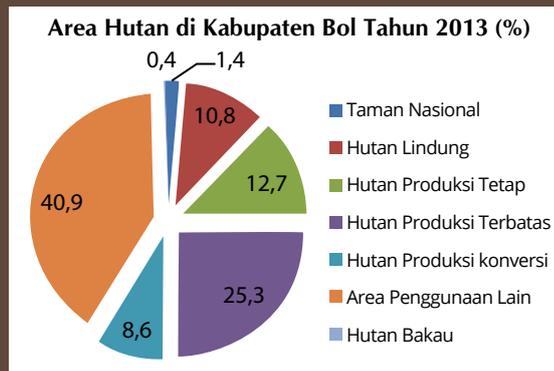
Setelah melalui rangkaian pertemuan dengan Bappeda Kabupaten Buol, pada tanggal 24 Juni 2014 ICRAF bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Buol mengadakan lokakarya pembukaan kegiatan penelitian Smart Tree-Invest. Bertempat di Kantor Bupati Buol, lokakarya ini merupakan perkenalan resmi Tim Smart Tree-Invest Indonesia kepada para pemangku kepentingan, sekaligus menjadi forum untuk mendapatkan masukan sebelum memulai kegiatan penelitian dan pengembangan skema investasi bersama. Selain pemangku kepentingan setempat, pengurus nasional dan kabupaten dari Program Rural Empowerment for Agriculture Development (READ, program Kementerian Pertanian yang didanai oleh IFAD) dan Universitas Tadulako (universitas negeri di Sulawesi Tengah) juga ikut berpartisipasi dalam lokakarya.

dr. Amiruddin Rauf, Bupati Kabupaten Buol, dalam pembukaan lokakarya menjelaskan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Buol. Kekayaan sumber daya alam Buol memberikan kesempatan yang luas bagi warganya untuk mencari penghidupan melalui kegiatan pertanian. Namun, kenyataannya petani di Buol umumnya didominasi oleh petani miskin. Berkaca dari situasi tersebut, rencana pembangunan Kabupaten Buol 2013-2017 terutama ditujukan untuk meningkatkan pembangunan pertanian dan manajemen sumber daya alam.

Dr. Beria Leimona, Koordinator Proyek untuk Smart Tree-Invest, mewakili ICRAF untuk memperkenalkan konsep agroforestri, kerentanan, jasa lingkungan, dan pembayaran/ investasi bersama dalam penyediaan jasa lingkungan. Penekanan khusus diberikan pada konsep investasi bersama dalam penyediaan jasa lingkungan, sehingga tidak disalah-artikan dengan investasi yang berorientasi untuk mengejar keuntungan semata. Dalam kesempatan ini, Dr. Leimona juga berbagi pembelajaran dari RUPES, program penelitian aplikatif dalam pembayaran jasa lingkungan yang dikoordinasi ICRAF pada tahun 2002-2012.

Dr. Betha Lusiana, Koordinator Smart Tree-Invest untuk Indonesia kemudian menjelaskan rencana kegiatan Smart Tree-Invest di Kabupaten Buol selama tiga tahun ke depan (2014-2017). Di Buol, kegiatan penelitian dan pengembangan investasi bersama akan dilakukan di dua klaster bentang alam: pesisir dan daerah aliran sungai (DAS). Kegiatan tahun pertama akan difokuskan pada serangkaian penelitian untuk menilai kerentanan petani kecil dan peran lanskap dalam menyediakan

Kabupaten Buol masih didominasi kawasan hutan



Persentase kawasan hutan di Kabupaten Buol tahun 2013 (BPS Kabupaten Buol, 2013)

Menurut data Kabupaten Buol dalam Angka (BPS Kabupaten Buol, 2013), tutupan lahan di Kabupaten Buol masih didominasi oleh kawasan hutan. Berdasarkan data tersebut, 40,9% dari kawasan Hutan masih berupa Area Penggunaan Lain (APL). Hal ini berarti Kabupaten Buol masih memiliki potensi yang cukup besar yang belum dimanfaatkan sehingga perencanaan yang baik diperlukan agar dapat memaksimalkan potensi Kabupaten Buol dengan tetap memperhatikan dan menjaga fungsi ekosistem untuk menyediakan jasa lingkungan.

jasa lingkungan. Pada tahun kedua dan ketiga, hasil penelitian akan digunakan untuk melibatkan para pemangku kepentingan dalam pengembangan skema investasi bersama dalam penyediaan jasa lingkungan.

Sesi lokakarya dilanjutkan dengan diskusi kelompok guna memperoleh gambaran mengenai kondisi Kabupaten Buol, meliputi permasalahan, perencanaan dan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Dalam sesi diskusi, peserta dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Pesisir dan DAS, dengan difasilitasi oleh peneliti ICRAF. Diskusi kelompok pesisir berhasil mengidentifikasi tiga permasalahan utama di daerah pesisir, yaitu: deforestasi hutan bakau, abrasi wilayah pantai, dan kemiskinan.

Sedangkan tiga permasalahan utama yang diidentifikasi oleh kelompok DAS antara lain: alih guna lahan, abrasi, sedimentasi, dan erosi, serta kurang maksimalnya peran pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah dan LSM) dalam pengelolaan DAS.

Permulaan untuk perencanaan dan pembangunan yang lebih baik

Di dalam lokakarya, Bupati Buol menyampaikan apresiasi kepada World Agroforestry Centre (ICRAF) yang telah memilih Kabupaten Buol sebagai wilayah kegiatan Smart Tree-Invest. Selain itu, beliau juga berharap hasil penelitian tersebut dapat memberikan masukan bagi program yang sudah

berjalan maupun perencanaan pembangunan Kabupaten Buol periode selanjutnya (2017-2022).

Bagi World Agroforestry Centre, bekerja di Sulawesi Tengah merupakan pengalaman yang baru. Namun, dengan sambutan hangat, dukungan, serta komitmen pemerintah Buol untuk mengakomodasi kegiatan proyek, Tim Smart Tree-Invest Indonesia semakin optimis untuk menghasilkan penelitian ilmiah yang mampu memberikan masukan bagi pembangunan, mengembangkan skema investasi bersama jasa lingkungan yang dapat membantu petani meningkatkan penghidupan mereka, serta menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Buol.

pojok publikasi

Perencanaan penggunaan lahan untuk strategi pembangunan rendah emisi (Land-use planning for low-emission development strategies/LUWES)

Sonya Dewi, Feri Johana, Andree Ekaadina and Putra Agung

Aksi mitigasi perubahan iklim pada sektor berbasis lahan yang berpihak terhadap masyarakat miskin serta berorientasi terhadap pembangunan berkelanjutan membutuhkan proses perencanaan penggunaan lahan yang baik yakni bersifat inklusif, transparan, dan integratif. Mewujudkan perencanaan penggunaan lahan yang melibatkan beragam pemangku kepentingan membutuhkan beberapa terobosan dari sisi kesadaran dan komitmen politik, pemahaman para pihak serta kapasitas teknis untuk menstimulasi berjalannya proses negosiasi. LUWES

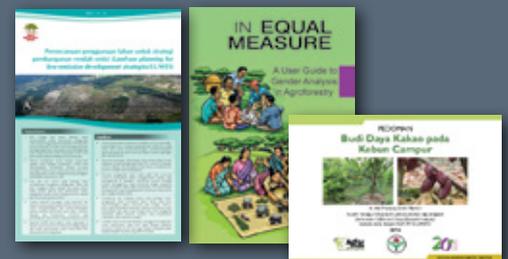
(Land Use Planning for Low Emission Development Strategy) kini telah marak diadopsi sebagai pendekatan teknis dalam proses perencanaan penggunaan lahan.

In Equal Measure: A User Guide to Gender Analysis in Agroforestry

Delia Catacutan, E. McGaw and MA Llanza

Ulasan ini menganalisa konsep dari Imbal Jasa Lingkungan pada negara berkembang dan menggali cara pola pikir dan pendekatan yang dipersepsikan dan dipengaruhi oleh negara-negara dengan perbedaan sejarah pola penggunaan lahannya, kepemilikan tanah, rezim kepemilikan, kepadatan populasi pedesaan dan tingkat integrasi pasar.

Imbal Jasa Lingkungan dapat dimengerti melalui perspektif dari "pendukung negosiasi" dimana pengetahuan yang beragam dan nilai sistem interaksi serta bentuk landasan negosiasi dan hasilnya.



Pedoman Budi Daya Kakao pada Kebun Campur

A. Adi Prawato and Endri Martini

Buku saku ini merupakan kumpulan hasil penelitian Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka), Jember, Jawa Timur.

Buku ini disusun dalam rangka kegiatan Sekolah Lapang AgFor Sulawesi yang diadakan pada bulan Oktober 2013 di Sulawesi Selatan, dengan Bapak A. Adi Prawoto sebagai narasumbernya.

Organisasi agroforestri di Indonesia membentuk kemitraan dengan World Agroforestry Centre

Oleh: M. Siarudin*

“Tiga organisasi kunci di Indonesia yang berkiprah pada agroforestri telah bergabung dengan World Agroforestry Centre untuk memajukan agenda bersama”, kata M. Siarudin



Jabat tangan simbolis saat penandatanganan perjanjian kerjasama.

Kiri-Kanan: Dr. Margaret Kroma, Asisten Direktur Jenderal, Kemitraan dan Dampak, World Agroforestry Centre; Ir. Harry Budi Santoso, Kepala, Balai Penelitian dan Teknologi Agroforestri, Departemen Kehutanan; Dr. Mahrus Aryadi, Ketua, Jaringan Indonesia untuk Pendidikan Agroforestry; Dr. Ujjwal Pradhan, Koordinator Regional, World Agroforestry Centre Asia Tenggara; Ir. Encep Rachman, Sekretaris Jenderal, Masyarakat Agroforestri Indonesia; Dr. Ma'mun Sarma, Dosen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor dan anggota INAFE; Dr. Sonya Dewi, Indonesia Country Coordinator, World Agroforestry Centre (foto: Sadewa)

Penandatanganan perjanjian kerjasama (*Collaborative Agreement*) antara 4 instansi yang bergerak di bidang agroforestri telah dilakukan di kantor World Agroforestry Center/ ICRAF, Bogor, pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2014. Keempat instansi yang mendandatangani MoU tersebut adalah Masyarakat Agroforestri Indonesia (MAFI), Balai Penelitian Teknologi Agroforestry (BPTA), ICRAF dan The Indonesian Network for Agroforestry Education (INAFE). Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Ir. Encep Rachman, MSc selaku Sekretaris Jenderal MAFI, Ir. Harry Budi Santoso, MP selaku Kepala BPTA, Dr. Ujjwal Pradhan selaku Koordinator ICRAF Wilayah Asia Tenggara, dan Dr. Mahrus Aryadi selaku Ketua Umum INAFE.

Penandatanganan MoU ini merupakan perwujudan keinginan keempat instansi untuk bekerjasama dalam mengembangkan agroforestri di Indonesia. Ir. Harry Budi Santoso dalam sambutannya mengatakan bahwa MoU

antara keempat instansi ini digagas oleh pengurus MAFI yang juga disambut baik oleh para pihak yang lainnya. Menurut Ketua Umum MAFI yang juga sekaligus Kepala BPTA ini, kegiatan-kegiatan dilakukan secara terpisah diharapkan dapat dilakukan lebih terpadu setelah adanya kesepakatan MoU ini.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Ujjwal Pradhan mengatakan bahwa pendekatan kolaboratif ini sangat diperlukan dalam pengembangan agroforestri pada berbagai level, mulai dari petani, keluarga, masyarakat hingga lanskap. *“No single institution can fulfil all expectation”*, kata Koordinator ICRAF wilayah Asia Tenggara tersebut, menambahkan alasan kenapa pendekatan kolaborasi ini menjadi sangat penting. Dr. Ujjwal Pradhan juga mengungkapkan bahwa komitmen untuk berkolaborasi ini diharapkan tidak hanya terbatas pada seremonial penandatanganan MoU ini saja, melainkan benar-benar sampai

pada komitmen untuk bersinergi mengembangkan agroforestri. Sementara Dr. Mahrus Aryadi menambahkan bahwa sinergi keempat institusi ini akan saling memperkuat pengembangan agroforestri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. ICRAF dan BPTA merupakan lembaga yang mewakili lembaga non pemerintah dan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang penelitian, sementara INAFE bergerak di bidang pendidikan, dan MAFI mewakili masyarakat madani (*civil society*) secara umum.

Dr. Margaret Kroma, Asisten Direktur Jenderal ICRAF, yang juga berkesempatan hadir dalam acara ini menyampaikan hal senada bahwa kolaborasi antar instansi ini sejalan dengan kebijakan program ICRAF. Dr. Kroma mengatakan bahwa ICRAF telah banyak menghasilkan berbagai luaran riset, dan tantangan berikutnya adalah bagaimana produk-produk penelitian yang telah dihasilkan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak ini, diharapkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dapat lebih terpadu.

Salah satu kegiatan kolaboratif yang akan diagendakan keempat instansi pada tahun ini adalah penyelenggaraan Pekan Nasional Agroforestri 2014. Kegiatan yang diharapkan akan berlangsung secara periodik ini berskala nasional dan terdiri dari berbagai kegiatan yang puncaknya berupa seminar dan gelar teknologi. Konsep dan teknis kegiatan sedang dalam proses pematangan dan diharapkan rangkaian kegiatan dapat dimulai dalam waktu dekat.

* Bidang Informasi dan Publikasi
Pengurus Pusat - Masyarakat
Agroforestri Indonesia

Konferensi kelima Jaringan Perhutanan Sosial ASEAN “Peningkatan sumber penghidupan dan manfaat konservasi dari perhutanan sosial: menuju masyarakat ASEAN yang hijau”

Oleh: Reny Juita

Sekilas tentang konferensi

Jaringan Perhutanan Sosial Persatuan Negara-negara Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations Social Forestry Network (ASFN), terbentuk pada tahun 2005 guna memajukan sektor perhutanan sosial baik dari segi kebijakan maupun pelaksanaannya di wilayah Asia Tenggara. ASFN bertujuan untuk berkontribusi dalam mencapai ketahanan pangan melalui penggunaan sumber daya lahan, hutan, air yang berkelanjutan melalui pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim. ASFN turut berkontribusi dalam pelaksanaan Kerangka Kerja Multi Sektorial Perubahan Iklim: Pertanian dan Kehutanan menuju Ketahanan Pangan, Rencana Aksi Strategi Kerjasama ASEAN di bidang Kehutanan, dan Cetak Biru ASEAN untuk Pembangunan Masyarakat ASEAN, khususnya untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (the ASEAN Multisectoral Framework on Climate Change: Agriculture and Forestry towards Food Security (AFCC), the Strategic Plan of Actions of the ASEAN Cooperation in Forestry, and the ASEAN Blueprints for ASEAN Community Building, particularly for the ASEAN Economic Community (AEC) and the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)).

Dengan dukungan dari semua anggota Negara ASEAN serta organisasi Kemitraan ASEAN – Swiss dalam Perhutanan Sosial dan Perubahan Iklim (ASEAN-Swiss Partnership on Social Forestry and Climate Change/ ASFCC), ASFN mengadakan pertemuan kelima di Kota Kinabalu, Malaysia Timur pada tanggal 24 - 26 May 2014. Konferensi ini dihadiri oleh lebih dari 250 peserta yang berasal dari perwakilan negara-negara ASEAN, meliputi perusahaan swasta, jaringan



organisasi masyarakat sipil, Pemerintah Negara bidang lingkungan dan kehutanan, akademisi, mahasiswa, serta organisasi nasional Malaysia maupun organisasi internasional. Selain dari World Agroforestry Centre (ICRAF), peserta dari Indonesia yang hadir dalam konferensi ini antara lain: perwakilan dari Kementerian Kehutanan, Bina Perhutanan Sosial, dan beberapa CSO yang bergerak di bidang perhutanan sosial seperti Non-Timber Forest Product Indonesia Program, AMAN dan WARSU.

Pada hari pertama dan kedua, konferensi dilaksanakan di University Malaysia Sabah, Kota Kinabalu. Di hari ketiga, peserta konferensi diberi kesempatan untuk melihat dua lokasi kegiatan perhutanan sosial yang dilakukan di Kota Kinabalu. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah, Hutan Lindung Kelawat, Kota Belud dan Tagal

Kampung Poturidong, Kiulu; dan lokasi kedua adalah Hutan Alam Winokok, Bundu Tuhan, Ranau dan Tagal Kampung Luanti Ranau.

Selain pertemuan dan kunjungan lapangan, konferensi ini juga mengadakan pameran (pameran) bagi para pemangku kepentingan kehutanan yang ingin memperkenalkan organisasi maupun kegiatannya. Dalam konferensi ini, ICRAF tidak hanya datang sebagai peserta tetapi juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menampilkan produk-produk komunikasi dan hasil kegiatan penelitian, terutama penelitian yang berkaitan dengan perhutanan sosial dan agroforestri.

Para pengajar dan mahasiswa di Universiti Malaysia Sabah, terutama dari Jurusan Kehutanan Tropis Internasional (*International Tropical Forestry School*) dimana Agroforestri

diajarkan, sangat tertarik dengan kegiatan dan penelitian ICRAF. Dalam kesempatan ini, ICRAF menyerahkan beberapa buku penelitian agroforestri dan perhutanan sosial kepada Pimpinan Jurusan Kehutanan Tropis Internasional, Dr. Normah Awang Besar. Kedepannya, diharapkan akan terjalin kerjasama dengan Jurusan Kehutanan Universiti Malaysia Sabah, terutama bagi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan penelitian maupun magang bersama ICRAF.

Hasil konferensi

Konferensi ini menghasilkan beberapa rekomendasi kunci untuk prioritas aksi strategi bagi ASFN dan ASEAN, yaitu:

a. **Rekomendasi lintas isu:** mengatur dan memonitor target perhutanan sosial di tingkat nasional dan regional; mengadopsi pendekatan berbasis hak untuk membuat kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan perhutanan sosial; menjamin kepemilikan lahan bagi masyarakat asli dan masyarakat lokal lainnya (khususnya pengguna hutan adat, peladang berpindah) and akses terhadap sumber daya kayu; mengadopsi dan melaksanakan Pedoman Sukarela Reformasi Penguasaan Hutan (*Voluntary Guidelines on Forest Tenure Reform*); Adopsi atau mereformasi peraturan dan kebijakan

untuk mempermudah proses pendaftaran perhutanan sosial dan menghilangkan hal-hal yang menghambat usaha kecil menengah yang berbasis perhutanan sosial.

b. **Perhutanan sosial untuk adaptasi perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati:** mengadopsi metodologi umum untuk menilai kerentanan terhadap perubahan iklim dan mengintegrasikan hasil penilaian tersebut dalam rencana nasional maupun regional yang berhubungan dengan kehutanan sosial.

c. **Ekonomi dan mata pencaharian masyarakat:** menetapkan proses regional untuk melindungi hak kekayaan intelektual (HKI) atas produk lokal dan pengetahuan (termasuk protokol hak cipta, pendaftar) konsisten dengan United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) dan perjanjian internasional lainnya; memasukan industri kreatif (produk lokal, produk seni) sebagai sektor prioritas bagi integrasi ekonomi ASEAN; menetapkan, mengembangkan pedoman dan meminta kontribusi AMS untuk membuat sebuah *Trust Fund* untuk usaha kecil menengah yang berbasis perhutanan sosial; mengadopsi pedoman sukarela keterlibatan sektor swasta dan

hak asasi manusia sesuai dengan pedoman *due diligence* Perserikatan Bangsa Bangsa dan perjanjian internasional; mendukung kampanye pemasaran dan konsumen untuk mempromosikan perdagangan intra-ASEAN dalam produk ekonomi kreatif / budaya, sambil memastikan *Intellectual Property Rights* (IPR) dan lacak balak terlacak; memfasilitasi berbagai keahlian teknis melalui MoU antara pusat pengembangan dan penelitian unggulan produk hutan di ASEAN; menetapkan program dukungan *value chain* untuk usaha kecil menengah berbasis perhutanan sosial; memberikan insentif kepada masyarakat dan usaha kecil menengah yang berbasis perhutanan sosial.

d. **Perhutanan sosial dan REDD+:** menetapkan mekanisme dan mengembangkan pedoman operasional untuk melaksanakan perlindungan sosial dan lingkungan pada perhutanan sosial; perhutanan sosial juga mendorong ketahanan pangan dan kedaulatan pangan; memperkuat lembaga-lembaga perhutanan sosial melalui dukungan untuk mekanisme *multi-stakeholder* tingkat nasional, hubungan yang efektif dan desentralisasi kewenangan kepada badan-badan lokal.

Negara Swiss, ASEAN dan perhutanan sosial:

Duta Besar Negara Swiss untuk ASEAN memiliki keterlibatan secara pribadi maupun profesional dengan perhutanan sosial

Oleh: Robert Finlayson, diterjemahkan oleh Tikah Atikah

Yang Mulia Lim Hong Hin, wakil sekretaris jenderal Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk Komunitas Ekonomi ASEAN, menghadiri acara perpisahan Duta Besar Negara Swiss untuk ASEAN yang diselenggarakan oleh Perwakilan Sekretariat ASEAN dari Divisi Industri Pertanian dan Sumber Daya Alam. Perwakilan dari mitra-mitra jaringan

Perhutanan Sosial ASEAN, Kedutaan Besar Swiss di Jakarta, dan para undangan dari organisasi mitra lainnya juga hadir dalam acara yang sangat berkesan tersebut.

“Bagi saya hutan memiliki nilai yang sangat tinggi, tetapi rentan”, kata Duta Besar Walker-Nederkoorn. “Melestarikan dan menjaga hutan telah menjadi budaya negara Swiss sejak

lama. Namun, sejak abad sembilan belas, banyak hutan yang musnah karena vegetasi yang ada di dalamnya dijadikan sebagai bahan industri, bangunan dan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan seiring dengan pertumbuhan populasi dalam negeri. Hal ini menyebabkan area berlereng menjadi gundul, tanah longsor dan pencemaran sumber air di tahun 1872,



Kiri-Kanan: Duta besar Heinz Walker-Nederkorn bersama Doris Capistrano dan Ujjwal Pradhan memberikan penghargaan sebuah karikatur yang menggambarkan kiprah beliau di dunia perhutanan sosial di Asia Tenggara (foto-foto: Sadewa)



maka dari itu disahkanlah undang-undang pertama untuk mengendalikan penebangan pohon, termasuk aturan bahwa jika satu pohon dipotong, pohon pengganti harus ditanam. Sejak itu, orang-orang Swiss memberikan perhatian besar terhadap hutan mereka dan kami juga menyampaikan kekhawatiran tersebut ke Badan Pengembangan dan Kerjasama Swiss di seluruh dunia”.

Kesadaran ini adalah kunci untuk memperkuat peran penting bahwa perhutanan sosial—pengelolaan hutan secara partisipatif oleh masyarakat lokal—berperan dalam menangani dampak negatif dari perubahan iklim dan agenda ketahanan pangan di negara-negara anggota ASEAN.

“Bapak Duta Besar juga memiliki peran kuat dalam mendukung pengelolaan hutan lestari di ASEAN”, kata Dr Doris Capistrano, penasehat senior, Kemitraan Perhutanan Sosial dan Perubahan Iklim, ASEAN-Swiss. “Beliau tidak hanya membawa pengalaman masa kecilnya akan kecintaannya terhadap hutan, tetapi juga pengalaman profesional dan antusiasmenya yang sangat bermanfaat bagi kami. Kami ingat akan keteladanan dan dukungannya, sebagai contoh, partisipasi aktifnya pada semua sesi dalam konferensi

Jaringan Perhutanan Sosial ASEAN, bahkan menekankan kesimpulan yang beliau sampaikan kepada para peserta dalam acara penutupan. Meskipun sekarang beliau memutuskan untuk melanjutkan kiprahnya di Asia Selatan, namun jasa-jasanya akan terus dikenang di sini dan kami akan selalu memberi informasi mengenai perkembangan di lapangan dimana beliau telah banyak mewujudkan rasa cintaannya di sini.

Ms Sagita Arhidani, kepala sekretariat jaringan, menambahkan bahwa, “Dengan terciptanya Jaringan Kehutanan Sosial ASEAN pada tahun 2005, ASEAN mengakui bahwa secara aktif melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan merupakan unsur yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan dan mencapai pengelolaan lanskap berkelanjutan dengan hutan dan agroforest”.

Hari ini, hampir 10 juta hektar lahan hutan yang dikelola secara aktif oleh 70 juta orang di seluruh Asia Tenggara, merupakan hasil dari upaya yang telah dilakukan bersama dari negara-negara anggota ASEAN, Jaringan Kehutanan Sosial ASEAN, kemitraan di Perhutanan Sosial dan perubahan iklim yang secara aktif didorong oleh Duta Besar Walker-Nederkorn melalui Badan Swiss untuk Pengembangan dan Kerjasama.

“Jaringan Kehutanan Sosial ASEAN telah menjadi pemeran aktif bidang perhutanan sosial di Asia Timur dan Tenggara selama lebih dari 30 tahun, mendukung pengembangan kapasitas dan penelitian”, kata Dr Ujjwal Pradhan, koordinator regional World Agroforestry Centre Asia Tenggara. “Jaringan ini didirikan pada tahun 1985 oleh RECOFTC, sekarang dikenal sebagai Pusat Masyarakat dan Hutan, dengan kantor pusat di Thailand dan dimandatkan untuk seluruh sub-region. Saya bangga menjadi anggota dewan Pusat, pekerjaan yang sangat penting untuk memastikan hak-hak masyarakat adat, masyarakat lokal, perempuan dan kelompok marjinal yang menjaga hutan, dan diakui oleh pemerintah serta dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan lahan hutan lainnya”.

Selain itu, sejak tahun 1988, Swiss secara teknis dan finansial telah mendanai lebih dari 30 proyek melalui organisasi kayu tropis internasional di Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand; dan secara bilateral mendukung pengembangan pendidikan sosial kehutanan di Viet Nam, mosaik lanskap hutan di Laos dan proses refleksi tentang tata kelola hutan dan desentralisasi di Indonesia.

» Seminar Nasional Pengelolaan DAS Terpadu Untuk Kesejahteraan Masyarakat

30 September – 1 Oktober 2014

Malang, Indonesia

Seminar ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan sarana bagi para pihak untuk dapat menyampaikan dan membahas hasil penelitian terkini tentang pengelolaan DAS, sehingga akan terjalin komunikasi interaktif antar pihak terkait tentang teknologi dan metode pengembangan pengelolaan DAS.

Seminar Nasional Pengelolaan DAS Terpadu diselenggarakan oleh Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPTKP DAS) bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, dengan mitra utama World Agroforestry Centre (ICRAF-SEA), Himpunan Ilmu Tanah (HITI) Komda Jatim, dan Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia (MKTI).

Informasi lebih lanjut:

Sekretariat: Fakultas Pertanian Universitas Jl. Veteran Malang

Email: semnasdas@ub.ac.id

Website: <http://semnasdas2014.ub.ac.id/index.php/call-for-papers>

» Pekan Nasional Agroforestri ke-1

28-30 Oktober 2014

Ambon, Indonesia

Sebagai suatu sistem pemanfaatan lahan yang berkembang dari berbagai kearifan lokal masyarakat di Indonesia, agroforestri diyakini dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah dengan memberikan peluang tenaga kerja (*pro job*), meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin (*pro poor*), meningkatkan ekonomi lokal (*pro growth*), serta ketahanan lingkungan (*pro environment*). Oleh karena itu keberadaan agroforestri sebagai kearifan lokal masyarakat perlu dipertahankan dan dilestarikan agar semakin member kontribusi dan menjadi bagian yang terpadu dalam sistem pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kegiatan ini merupakan inisiasi Masyarakat Agroforestri Indonesia (MAFI) bersama Balai Penelitian Teknologi Agroforestry (BPTA), World Agroforestry Centre (ICRAF), dan Indonesia Networks for Agroforestry Education (INAFE).

Informasi lebih lanjut:

Sekretariat masyarakat Agroforestri Indonesia

Balai Penelitian Teknologi Agroforestry, Ciamis

Jl. Raya Ciamis-Banjar Km. 4, PO BOX 5, Ciamis 46201

Email: mafindo2012@yahoo.com

Cp: Ir. Harry Budi Santoso, MP; Hp. 081320128755;

Email: mashbsan@yahoo.co.id

» Can Agroforestry Address Food Security Concerns under a Changing Climate?

11 – 12 November 2014

Göteborg, Sweden

Tujuan dari *workshop* ini adalah untuk menyatukan para sarjana-praktisi terkemuka dari 5 negara di dunia, Swedia, Nepal, Sri Lanka, Kenya dan Ekuador, untuk berbagi ilmu pengetahuan dan aspirasi dari sistem agroforestri. Jumlah dari tingginya dan mapannya sistem produksi agroforestri sudah didokumentasikan ke seluruh dunia, namun mereka jarang mengangkat pertanyaan tentang ketahanan pangan. Perubahan iklim membuat sejumlah tantangan, terutama dalam skala besar, sistem pertanian komersial yang dikembangkan di abad kedua puluh. Mengubah suhu dan rezim air menghasilkan masalah hama baru dalam sistem tanaman monokultur, sedangkan tanaman sekarang sudah mulai memakai pestisida dan tahan akan herbisida. Akibatnya, ada kepentingan ilmiah dan kebijakan baru dalam sistem agroforestri yang mengandalkan keragaman dan pola tanam campuran untuk produktivitas mereka. Seminar ini akan membahas kemungkinan peningkatan sistem agroforestri untuk mengatasi kebutuhan ketahanan pangan dari abad kedua puluh satu.

Informasi lebih lanjut:

Kristina Fermskog

Telp: +46709116697

Email: kristina.fermskog@gu.se

Website: <http://www.siani.se/event/can-agroforestry-address-food-security-concerns-under-changing-climate/november-2014>

Reconciling multiple ecological knowledge systems in designing payments for watershed services in the uplands of Indonesia

Beria Leimona, Betha Lusiana, Meine van Noordwijk, Andree Ekadinata and Elok Mulyoutami

Daerah Aliran Sungai adalah area lahan yang memberikan sebagian kontribusinya untuk curah hujan yang mereka dapatkan khusus dari sistem irigasi dan juga pengaruhnya pada kuantitas, kualitas dan keteraturan dari aliran air yang penting bagi pengguna dan penduduk yg tinggal di hilir sungai. Penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan di hulu DAS dapat mempengaruhi aliran sungai dan sedangkan penduduk di hulu sungai mengandalkan DAS. Insentif ekonomi pada penduduk di hulu sungai, yang dioperasikan pada hak penggunaan lahan mereka, dapat membantu untuk menyelaraskan kepentingan semua pemangku kepentingan. Namun, pengetahuan dan istilah DAS menjadikan keharusan agar negosiasi berjalan efektif. Sebagai contohnya, kami melakukan analisa pengetahuan tentang sistem DAS di Indonesia.



Payments for ecosystem services: Evolution towards efficient and fair incentives for multifunctional landscapes

Beria Leimona, Rohit Jindal, Grace B. Villamor, M Vardhan, Sara Namirembe, Delia Catacutan, John Kerr, Peter Akong Minang and Thomas P Tomich

Ulasan ini menganalisa konsep dari Imbal Jasa Lingkungan pada negara berkembang dan menggali cara pola pikir dan pendekatan yang dipersepsikan dan dipengaruhi oleh negara-negara dengan perbedaan sejarah pola penggunaan lahannya, kepemilikan tanah, rezim kepemilikan, kepadatan populasi pedesaan dan tingkat integrasi pasar.

Imbal Jasa Lingkungan dapat dimengerti melalui perspektif dari "pendukung negosiasi" dimana pengetahuan yang beragam dan nilai sistem interaksi serta bentuk landasan negosiasi dan hasilnya.



Fairly efficient or efficiently fair: an evaluation of payment schemes for environmental services in Asia

Beria Leimona and Meine van Noordwijk

Melestarikan lingkungan yang seiring dengan mengentaskan kemiskinan adalah tujuan utama dalam meningkatkan lingkungan, terutama di daerah Asia, dan Imbal Jasa Lingkungan dikenal sebagai metode untuk membantu mencapai 2 tujuan ini. Kebijakan berbasis pasar seperti Imbal Jasa Lingkungan dikembangkan untuk menggambarkan setidaknya beberapa dari nilai keuangan jasa lingkungan dengan mendapatkan dan memperdagangkan jasa lingkungan dalam merespon fakta yang menyatakan bahwa pasar konvensional gagal dalam merefleksikan nilai penuh atau benar dari layanan gratis seperti air murni, menghemat kebutuhan untuk pemurnian buatan, atau penyerbukan alami, yang meningkatkan hasil panen.



Koleksi publikasi dapat di akses melalui:

www.worldagroforestry.org/regions/southeast_asia/publications

Informasi lebih lanjut:

Melinda Firds (Amel)

Telp: (0251) 8625415 ext. 756; Fax: (0251) 8625416

email: icrafseapub@cgiar.org